

Analisis kekurangan rumah atau Backlog di dapatkan berdasarkan perspektif kepenghunan dihitung dengan mengacu pada konsep perhitungan ideal: 1 keluarga menghuni 1 rumah. Backlog kepemilikan dihitung berdasarkan angka home ownership rate /persentase rumah tangga (ruta) yang menempati rumah milik sendiri. Hal tersebut diakibatkan jumlah penduduk yang memiliki rumah dengan hak milik belum semuanya

Untuk mengatasi backlog rumah yaitu dengan pemenuhan kebutuhan rumah (formal atau swadaya). Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan rumah dan mengurangi jumlah backlog maka pembangunan hunian baru dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Pembangunan unit rumah diarahkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang berarti pembangunan hunian sederhana. Konsep menghuni dalam perhitungan backlog merepresentasikan bahwa setiap keluarga tidak diwajibkan untuk memiliki rumah, tetapi Pemerintah memfasilitasi/mendorong agar setiap keluarga, terutama yang tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa menghuni rumah yang layak, baik dengan cara sewa/kontrak, beli/menghuni rumah milik sendiri, maupun tinggal di rumah milik kerabat/keluarga selama terjamin kepastian bermukimnya (secure tenure).

Upaya penyediaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman baru, dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat, dan sebagian lagi oleh pemerintah dan swasta/developer, berikut penjelasannya:

1. Pembangunan Rumah Oleh Swadaya Masyarakat.

Aktivitas pembangunan oleh swadaya masyarakat diantaranya adalah:

- pengkavlingan lahan;
- pengadaan sarana prasarana lokal;
- perencanaan bangunan;
- pembuatan bangunan rumah;
- pengelolaannya.

Aktivitas-aktivitas ini dilakukan dengan sistem gotong-royong dengan aturan main yang disepakati secara kolektif. Peran pemerintah sebagai regulator sangat kecil dalam rangkaian kerja pembangunan perumahan dan permukiman adat. Aspek kolektifitas ini masih berlangsung hingga saat ini karena masyarakat masih mempertahankan aspek kepercayaan/ social capital antara satu dengan yang lain. Begitu juga dengan masyarakat Kabupaten Tanah Laut, sebagian besar masyarakat pedesaan memenuhi kebutuhan rumah secara swadaya, yang dilakukan dengan sistem gotong-royong.

2. Penyediaan Rumah oleh Swasta dan Pemerintah

Penyediaan rumah oleh pihak swasta antara lain yang dilakukan oleh para developer (pengembang perumahan). Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pihak pengembang perumahan (developer), selain mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan rumah yang layak, juga mempunyai misi profit oriented. Sehingga dalam pelaksanaannya lebih didasari oleh proses kerja yang profesional, dengan tidak ada sama sekali sifat kegotong royongan, hal ini yang membedakan dengan penyediaan rumah dengan sistem swadaya masyarakat. Walaupun demikian, diharapkan ada misi sosial yaitu menyediakan rumah yang layak yang dapat dijangkau oleh semua kalangan termasuk penduduk dengan penghasilan rendah. Seperti pembangunan rumah sangat sederhana (RSS), rumah sederhana (RS).

2. Jalan lingkungan merupakan penghubung kawasan sekunder dengan perumahan dan penghubung antar persil dalam kawasan perkotaan terhadap jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota. Sehingga jalan lingkungan tersebut tidak termasuk jalan mantap kabupaten.

USULAN BEDAH RUMAH DARI MUSRENBANG DAN POKIR TAHUN 2022

Tgl Usul	Pengusul	Profil	Kecamatan	Kelurahan	Rekom Kec (unit)	Realisasi 2022	Rencana 2023	Total	Sisa
11-02-2021	YAHYA	Kepala Desa Bawah Layung	Kurau	Bawah Layung	8	15		15	-7
11-02-2021	HIDAYAT NOOR, S. SE	Kepala Desa Panggung	Pelaihari	Panggung	40	1	3	4	36
11-02-2021	ALIANSYAH	Kepala Desa Tungkaran	Pelaihari	Tungkaran	40	0		0	40
11-02-2021	MULYONO	Kepala Desa Bumi Jaya	Pelaihari	Bumi Jaya	50	9		9	41
12-02-2021	H. ALPIAN TAURUS,S.Pd	Kepala Desa Pandahan	Bati Bati	Pandahan	26	9		9	17
12-02-2021	ARDIANSYAH	Kepala Desa Ujung Batu	Pelaihari	Ujung Batu	30	0		0	30
12-02-2021	ABDURAHMAN	Kepala Desa Padang	Bati Bati	Padang		23		23	-23
12-02-2021	UDIK SISWOYO	Kepala Desa Ambawang	Batu Ampar	Ambawang		3		3	-3
13-02-2021	MUHAMMAD RAYA	Kepala Desa Sungai Bakar	Bajuin	Sungai Bakar	80	19		19	61
13-02-2021	MUJI SLAMET	Kepala Desa Gunung Mas	Batu Ampar	Gunung Mas		6		6	-6
14-02-2021	RUSMADI	Kepala Desa Damar Lima	Batu Ampar	Damar Lima		0		0	0
14-02-2021	ANANG MULYANI	Kepala Desa Damit Hulu	Batu Ampar	Damit Hulu		9		9	-9
15-02-2021	BAMBANG SUBAGIO	Kepala Desa Tirta Jaya	Bajuin	Tirta Jaya	15	4		4	11
08-03-2021	ANANG KADERI	Kepala Desa Kurau	Kurau	Kurau		9		9	-9
JUMLAH					289	107	3	110	179

Tgl Usul	Pengusul	Profil	Kecamatan	Kelurahan	Rekom Setwan (unit)	Realisasi 2022	Rencana 2023	Total	Sisa
22-03-2021	MEGA PURNAMA, SM	PAN	Kurau	Sungai Bakau	4	0		0	4
22-03-2021	DADANG IMANUDIN, S. Kom	PKS	Kurau	Sungai Bakau	5	0		0	5
24-03-2021	Hj. ENDANG ISNAWANGSIH, SH	PKB	Kintap	Mekar Raya	1	1		1	0
24-03-2021	KHAIRIL ANWAR	Gerindra	Kurau	Raden	33	2		2	31
25-03-2021	KHAIRIL ANWAR	Gerindra	Takisung	Tabanio	1	0	1	1	0
25-03-2021	KHAIRIL ANWAR	Gerindra	Takisung	Pagatan Besar	1	1		1	0
06-04-2021	H. RAHIMULLAH	Golkar	Batu Ampar	Jilatan	1	0	1	1	0
06-04-2021	H. HUSNUL FATAHILLAH	Fraksi Nasional Demokrat	Tambang Ulang	Sungai Pinang	93	15		15	78
JUMLAH					139	19	2	21	118

Pada tahun 2022 alokasi pembiayaan untuk penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilaksanakan melalui :

1. APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 sebanyak 178 unit, dimana untuk penentuan penerima bantuan diutamakan dari database RTLH Kabupaten Tanah Laut .
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 285 unit dimana untuk penerima bantuan sesuai berdasarkan DTKS dari Dinas Sosial dan lokasi rumah berada dalam daerah kumuh yang telah ditetapkan melalui SK Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/657-KUM/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tanah Laut.

